



PANEN SAAT MUSIM GUGUR DI TIONGKOK

Tampak dalam foto di musim gugur ini para petani sedang memanen padi di sawah di Desa Xiamo, Kota Chenzhou, Provinsi Hunan, Tiongkok tengah, Kamis (31/8). Panen kenari juga terjadi di Kota Dongjiuzhai, Kota Zunhua, Provinsi Hebei, Tiongkok utara. Dan panen jagung di Kota Guanyindong, Kota Qianxi, Provinsi Guizhou, Tiongkok barat daya.

Kanada Keluarkan Peringatan Perjalanan ke AS Bagi Komunitas LGBTQ

UU Anti LGBTQ mulai diberlakukan di beberapa negara bagian AS.

TORONTO (IM) - Kanada sebagai salah satu negara paling toleran dengan komunitas LGBTQ+, pada pekan ini memperbarui peringatan, memberi alarm perjalanan ke AS, bagi komunitas LGBTQ+. Peringatan ini sebagai kewaspadaan karena beberapa negara bagian di AS telah memberlakukan undang-undang (UU) anti LGBTQ+ yang dapat memengaruhi mereka.

Departemen Urusan Global negara itu tidak menyebutkan negara bagian mana saja, tetapi menyarankan para pelancong LGBTQ+ dari Kanada, untuk memeriksa aturan dan perundang-undangan setempat di tempat tujuan mereka sebelum bepergian.

"Sejak awal 2023, beberapa negara bagian di AS telah mengesahkan undang-undang yang melarang pertunjukan drag show dan membatasi komunitas transgender dari

akses ke layanan yang sesuai dengan gender dan dari partisipasi dalam acara olahraga," kata juru bicara Urusan Global, Jérémie Bérubé, dalam sebuah pernyataan yang dikirim melalui email, Kamis (31/8).

"Di luar Kanada, hukum dan adat istiadat yang terkait dengan orientasi seksual, identitas gender, ekspresi gender, dan karakteristik jenis kelamin dapat sangat berbeda dengan yang ada di Kanada," tambah pernyataan tersebut.

Bérubé mengatakan tidak ada warga Kanada di AS yang mengeluh kepada Global Affairs tentang bagaimana mereka diperlakukan atau dihalangi untuk mengekspresikan pendapat mereka tentang masalah LGBTQ+.

Human Rights Campaign - organisasi terbesar di AS yang memperjuangkan hak-hak kaum lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer - pada bulan Juni lalu mengumumkan keadaan darurat bagi

kaum LGBTQ+ di AS.

NAACP atau Asosiasi Nasional untuk Kemajuan Orang Kulit Berwarna pada bulan Mei mengeluarkan peringatan perjalanan untuk Florida yang memperingatkan para calon wisatawan tentang undang-undang dan kebijakan terbaru yang diperjuangkan oleh Gubernur Ron DeSantis.

Ini termasuk RUU yang melarang perawatan bagi gender di luar dua gender (laki dan perempuan), yang menegaskan bagu gender untuk anak di bawah umur tetap tanpa diubah. Situasi di sana membatalkan pertunjukan drag show, membatasi diskusi tentang kata ganti orang diluar laki dan perempuan di sekolah, dan memaksa orang untuk menggunakan kamar mandi sesuai gender mereka.

Di Arkansas, Gubernur Sarah Huckabee Sanders tahun ini menandatangani undang-undang yang melarang orang-orang transgender di sekolah negeri menggunakan kamar kecil yang sesuai dengan identitas gender mereka. Undang-undang serupa telah diberlakukan di negara-negara

bagian seperti Alabama, Oklahoma dan Tennessee.

Ditanya mengenai perubahan saran perjalanan minggu ini, Wakil Perdana Menteri Kanada Chrystia Freeland mengatakan bahwa saran perjalanan yang dikeluarkan oleh Global Affairs di Kanada didasarkan pada saran dari para profesional di departemen yang bertugas memantau bahaya tertentu.

"Setiap pemerintah Kanada harus mengutamakan kepentingan dan keselamatan setiap warga Kanada dan setiap kelompok warga Kanada," kata Freeland.

Dia tidak mengatakan apakah pemerintahnya telah membahas masalah ini dengan mitranya dari AS.

"Kedengarannya seperti sinyal kebajikan dari Urusan Global," kata Nelson Wiseman, seorang profesor ilmu politik emeritus di Universitas Toronto.

Helen Kennedy, direktur eksekutif Egale Kanada, sebuah kelompok hak-hak LGBTQ+ di Toronto, memuji pemerintah Kanada yang telah mengeluarkan peringatan tersebut.

"Ada 500 legislasi anti-LGBTQ yang sedang berjalan di berbagai badan legislatif negara bagian saat ini," kata Kennedy.

Kennedy juga mengatakan bahwa Kanada perlu melihat secara serius seberapa aman komunitas LGBTQ+ di Kanada karena kebijakan serupa baru-baru ini diberlakukan di provinsi Saskatchewan dan New Brunswick, yang sekarang membutuhkan izin orang tua ketika anak-anak di bawah 16 tahun ingin menggunakan nama atau kata ganti yang berbeda di sekolah.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa Amerika Serikat berkomitmen untuk mempromosikan toleransi, inklusi, keadilan, dan martabat sambil membantu memajukan kesetaraan dan hak asasi manusia bagi kelompok LGBTQ+.

"Kita semua harus terus melakukan pekerjaan ini dengan mitra-mitra kita yang berpikiran sama, tidak hanya di Amerika Serikat, tidak hanya di Kanada, tetapi juga di seluruh dunia," ujar juru bicara tersebut melalui email. ● tom

Pemerintah Finlandia Menyetujui Kebijakan Anti-Rasisme Setelah Serangkaian Skandal

HELSINKI (IM) - Pemerintah Finlandia menyetujui kebijakan untuk memerangi rasisme. Setelah pemerintah koalisi sayap kanan dilanda serangkaian skandal rasisme selama berbulan-bulan.

Perdana Menteri Petteri Orpo mengatakan pemerintahannya setuju untuk mengatasi rasisme dan diskriminasi. Partai Koalisi Nasional (NCP) konservatif Orpo memenangkan pemilu bulan April lalu.

"Setiap menteri di pemerintahan akan meninggalkan rasisme dan berkomitmen untuk bekerja dengan aktif melawan rasisme di Finlandia dan internasional," katanya dalam konferensi pers bersama dengan tiga pemimpin partai lainnya seperti dikutip dari Aljazeera, Jumat (1/9).

Setelah memenangkan pemilu pada bulan Juni lalu pemerintah dilanda skandal rasisme. Usai para menteri dari Partai Finlandia yang merupakan bagian dari koalisi empat partai memuat artikel yang dianggap rasis dan fanatik.

Menteri Ekonomi Vilhelm Junnila terpaksa mengundurkan diri karena berulang kali menyebut pemimpin Nazi Jerman Adolf Hitler dan Nazi di media sosial dan iklan kampanye, yang menurutnya hanya lelucon.

Pada bulan Juli lalu Menteri Keuangan dan pemimpin Partai Finlandia Rikka Purra meminta maaf atas komentar yang dia akui diunggah secara anonim sekitar 15 tahun yang lalu. Namun dia berargumen bahwa komentar tersebut diambil di luar konteks.

Dalam unggahan blog lamanya, Purra menulis, "Jika saya diberi senjata, pasti

ada mayat." Ia melontarkan pernyataan tersebut setelah seorang anak berlatar belakang migran menirukan penembakan dengan jari.

"Saya ingin menekankan bahwa saya dan partai Finlandia serta semua orang akan mendukung pernyataan [Orpo] ini secara keseluruhan," kata Purra usai Perdana Menteri menyampaikan kebijakan anti-rasisme.

Beberapa pejabat Finlandia meminta maaf atas komentar yang dibuat sejak pemerintahan koalisi berkuasa. Menteri Luar Negeri Finlandia Elina Valtonen harus meminta maaf kepada Turki atas postingan blognya pada tahun 2008 yang menyebut seorang pria sebagai "monyet Turki" dengan nama samaran.

Valtonen mengatakan komentar tersebut "tidak mewakili nilai-nilai kami dan tidak akan pernah mewakili nilai-nilai kami".

Serangkaian skandal dari pemerintahan baru terpilih memicu ketegangan dengan Partai Rakyat Swedia (SPP) yang berhaluan tengah. SPP juga merupakan anggota koalisi berkuasa. Namun pemimpin SPP Anna-Maja Henriksson mengatakan partainya mendukung kebijakan baru tersebut, sehingga kecil kemungkinan cukup dukungan untuk mosi tidak percaya pada pemerintah.

"Kalau SPP, yang jadi pertanyaan apakah kami bisa berpartisipasi di pemerintahan atau tidak ke depan. Pengumuman tersebut merupakan indikasi jelas bahwa pemerintah tidak menerima rasisme dalam bentuk apa pun," kata Henriksson. ● gul

Tersesat di Laut, 2 Turis Maroko Ditembak Mati Penjaga Pantai Aljazair

RABAT (IM) - Penjaga pantai Aljazair dilaporkan telah menembak mati dua wisatawan yang sedang berlibur di Maroko, yang tersesat ke perairan Aljazair dengan jet ski mereka.

Mereka termasuk di antara empat warga negara ganda Prancis-Maroko yang berangkat dengan jet ski dari resor Saidia di Maroko. Anggota ketiga dari kelompok itu ditangkap oleh penjaga pantai yang berpatroli di perbatasan tertutup kedua negara bagian.

Penembakan itu memicu kemarahan di Maroko setelah seorang nelayan memposting video mayat yang mengambang di laut.

Perbatasan antara Aljazair dan Maroko ditutup pada 1994, dan Aljir memutuskan hubungan dua tahun lalu. Mereka menuduh Maroko melakukan tindakan permusuhan - sebuah tuduhan yang ditolak oleh Rabat.

Mohamed Kissi adalah

satu-satunya dari kelompok beranggotakan empat orang yang berhasil kembali ke Maroko, lapor kantor berita AFP, mengutip media Maroko. Dia mengatakan kelompok itu tersesat dan kehabisan bahan bakar.

"Kami tersesat namun kami terus berjalan sampai kami tiba di Aljazair," kata Kissi, yang saudara laki-lakinya, Bilal, terbunuh, sebagaimana dilansir BBC.

"Kami tahu kami berada di Aljazair karena perahu hitam Aljazair mendarang kami" dan orang-orang di dalamnya "menembaki kami", katanya.

"Alhamdulillah saya tidak tertembak, tapi mereka membunuh saudara laki-laki saya dan teman saya," tambahnya.

Dia akhirnya dijemput oleh angkatan laut Maroko dan dibawa kembali ke Saidia, tambahnya.

Abdelali Merchouer disebut sebagai orang kedua yang terbunuh.

"Pria yang ditangkap oleh penjaga pantai Aljazair, bernama Smail Snabe, dilaporkan muncul di hadapan jaksa pada Rabu, (30/8) tetapi tidak ada rincian yang diberikan.

Seorang juru bicara pemerintah Maroko menolak mengomentari penembakan itu, dan mengatakan kepada AFP bahwa itu adalah "masalah peradilan".

Belum ada komentar langsung dari Aljazair.

Kedua negara memiliki sejarah ketegangan yang panjang karena mereka terus berselisih di Sahara Barat.

Maroko dan Aljazair berbagi perbatasan sepanjang hampir 2.000 km yang telah menjadi sumber ketegangan sejak kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Perancis.

Perbatasan kedua negara ditutup pada 1994 karena alasan keamanan setelah militan Islam megebom sebuah hotel di kota bersejarah Marrakesh, Maroko. ● ans



PANDA KEMBAR RAYAKAN ULANG TAHUN KE-4 DI KEBUN BINATANG BERLIN

Sepasang panda raksasa Meng Xiang (Kiri) dan Meng Yuan menikmati kue ulang tahun mereka yang ke-4 di Kebun Binatang Berlin di Berlin, ibu kota Jerman, Kamis (31/8).

Uni Eropa Desak Semua Pihak di Gabon untuk Menahan Diri

BRUSSEL (IM) - Uni Eropa mendesak semua pihak di Gabon untuk menahan diri. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell mengatakan, Uni Eropa menolak perebutan kekuasaan secara paksa di Gabon.

Junta militer pada Rabu (30/8) telah merebut kekuasaan dan menjadikan Presiden Ali Bongo sebagai tahanan rumah.

Militer membatalkan hasil pemilu yang akan memperpanjang masa jabatan ketiga Bongo. Ini adalah kudeta militer kedelapan di Afrika Barat dan Tengah sejak 2020.

"Tantangan yang dihadapi Gabon harus diselesaikan sesuai dengan prinsip supremasi hukum, tatanan konstitusional, dan demokrasi. Perdamaian dan kemakmuran negara, serta stabilitas regional, bergantung pada hal ini," ujar Borrell.

Borrell menambahkan, Uni Eropa mempunyai keprihatinan serius mengenai cara pemilihan presiden sebelum kudeta diorganisir dan dilaksanakan. Borrell mengatakan, pemilu Gabon telah diganggu oleh penyimpangan.

"Ada kudeta militer dan kudeta institusional, di mana Anda tidak perlu mengangkat senjata, tetapi jika saya mencurangi pemilu untuk merebut kekuasaan, itu juga merupakan cara yang tidak biasa untuk melakukannya," ujar Borrell.

Presiden Bongo meminta tolong kepada seluruh negara-negara mitra untuk bertindak setelah militer

melakukan kudeta di negara kaya minyak di Afrika tengah itu. Setelah militer resmi mengumumkan kudeta, Bongo dan keluarganya ditahan.

"Saya mengirimkan pesan kepada semua teman-teman di seluruh dunia untuk memberitahu mereka agar bertindak. Orang-orang di sini menangkap saya dan keluarga saya," kata Bongo dalam sebuah video dalam bahasa Inggris.

Keluarga Bongo secara turun temurun telah memerintah Gabon selama lebih dari 55 tahun. Bongo ditempatkan sebagai tahanan rumah dan salah satu putranya ditangkap karena pengkhianatan. Dalam video itu, Bongo terlihat khawatir. Dia mengatakan putranya berada di satu lokasi, sementara istrinya ada di tempat lainnya.

"Saya di kediaman dan tidak terjadi apa-apa, saya tidak tahu apa yang terjadi, saya memanggil Anda untuk bertindak," ujar Bongo, dilaporkan Al Arabiya, Rabu (30/8).

Sebelumnya, seorang pemimpin militer mengatakan, putra Bongo dan penasihat dekatnya Noureddin Bongo Valentin, kepala stafnya Ian Ghislain Ngoulou serta wakilnya, dua penasihat presiden lainnya dan dua pejabat tinggi di Partai Demokrat Gabon (PDG) yang berkuasa telah ditangkap. Mereka dituduh melakukan makar, penggelapan, korupsi dan memalsukan tanda tangan presiden, serta tuduhan lainnya. ● gul

Erdogan dan Putin akan Bertemu di Sochi Bahas Kesepakatan Koridor Gandum

ANKARA (IM) - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Rusia Vladimir Putin dilaporkan akan mengadakan pertemuan di resor Sochi, Rusia, pada 4 September 2023 mendatang. Mereka bertemu untuk membahas nasib kesepakatan koridor gandum Laut Hitam atau Black Sea Grain Initiative (BSGI).

Rencana pertemuan Erdogan dan Putin diungkap dua sumber dari pemerintahan Turki kepada Reuters, Kamis (31/8). Menurut salah satu sumber, selain BSGI, Erdogan dan Putin bakal membahas dampak perang di Ukraina.

Sementara itu sebelumnya Moskow mengumumkan saat ini mereka sedang mempertimbangkan inisiatif Putin untuk memasok 1 juta ton biji-bijian ke Turki. Dari Turki, biji-bijian tersebut akan dikirim ke negara-negara paling membutuhkan.

"Menteri luar negeri Rusia dan Turki bermaksud mengerjakan parameter implementasi inisiatif Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin untuk memasok 1 juta ton biji-bijian Rusia ke Turki dengan harga lebih murah dari Qatar, setelah itu akan diproses di perusahaan-perusahaan Turki dan kemudian dikirim ke negara-negara yang paling membutuhkan," kata Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Rusia di situs resminya, dilaporkan kantor berita Rusia, TASS, Kamis (31/8) lalu.

Kemenlu Rusia menambahkan bahwa mereka menganggap proyek ini sebagai alternatif kerja yang optimal terhadap BSGI.

"Kami sekali lagi akan menjelaskan posisi Rusia terhadap Turki sesuai dengan pernyataan dari Kementerian Pertahanan Rusia tertanggal 19 Juli tahun ini: kapal ke Ukraina dianggap berpotensi membawa kargo militer yang terlibat dalam konflik di pihak Kiev," ungkap Kemenlu Rusia.

Sementara itu Juru Bicara Kemenlu Rusia Maria Zakharova mengungkapkan, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan akan berkunjung ke Moskow pada Kamis pekan ini. Dia hendak bertemu dan mengadakan pembicaraan dengan Menteri Luar

Negeri Rusia Sergey Lavrov.

Rusia telah menolak memperpanjang masa aktif BSGI yang berakhir pada 18 Juli 2023 lalu. Alasan utama Rusia menolak memperpanjang BSGI adalah karena ia merasa ketentuan terkait kepentingan Rusia dalam kesepakatan itu tidak dilaksanakan. Tuntutan terkait penyambungan kembali Bank Pertanian Rusia (Rosselkhozbank) ke sistem pembayaran SWIFT, misalnya, belum direalisasikan. Sanksi Barat yang menyebabkan komoditas pertanian dan pupuk Rusia tak bisa memasuki pasar global juga tak kunjung dicabut.

Alasan lain mengapa Rusia enggan memperpanjang BSGI adalah karena ia merasa kesepakatan tersebut sudah melenceng dari tujuan awal, yakni untuk memperlancar pengiriman komoditas pangan ke negara-negara membutuhkan. Namun Moskow menilai Ukraina secara terang-terangan "mengkomersialkan" BSGI dan mengirim produk pertaniannya ke negara-negara maju, terutama Eropa.

Masa aktif BSGI telah diperpanjang tiga kali, yakni pada November 2022, serta Maret dan Mei 2023. Pelabuhan-pelabuhan Ukraina di Laut Hitam diblokade setelah Rusia melancarkan agresi ke negara tersebut pada Februari 2022 lalu. Pada Juli 2022, Rusia dan Ukraina dengan bantuan mediasi Turki serta PBB menyepakati BSGI. Kesepakatan tersebut ditekdi di tengah kekhawatiran terjadinya krisis pangan global akibat konflik Rusia-Ukraina.

Lewat BSGI, Moskow memberikan akses bagi Ukraina untuk mengekspor komoditas pertaniannya lewat tiga pelabuhannya di Laut Hitam. Sebagai gantinya, Moskow meminta operasi kapal ke Ukraina dianggap berpotensi membawa kargo militer yang terlibat dalam konflik di pihak Kiev," ungkap Kemenlu Rusia.

Sementara itu Juru Bicara Kemenlu Rusia Maria Zakharova mengungkapkan, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan akan berkunjung ke Moskow pada Kamis pekan ini. Dia hendak bertemu dan mengadakan pembicaraan dengan Menteri Luar

Negeri Rusia Sergey Lavrov.

Rusia telah menolak memperpanjang masa aktif BSGI yang berakhir pada 18 Juli 2023 lalu. Alasan utama Rusia menolak memperpanjang BSGI adalah karena ia merasa ketentuan terkait kepentingan Rusia dalam kesepakatan itu tidak dilaksanakan. Tuntutan terkait penyambungan kembali Bank Pertanian Rusia (Rosselkhozbank) ke sistem pembayaran SWIFT, misalnya, belum direalisasikan. Sanksi Barat yang menyebabkan komoditas pertanian dan pupuk Rusia tak bisa memasuki pasar global juga tak kunjung dicabut.

Alasan lain mengapa Rusia enggan memperpanjang BSGI adalah karena ia merasa kesepakatan tersebut sudah melenceng dari tujuan awal, yakni untuk memperlancar pengiriman komoditas pangan ke negara-negara membutuhkan. Namun Moskow menilai Ukraina secara terang-terangan "mengkomersialkan" BSGI dan mengirim produk pertaniannya ke negara-negara maju, terutama Eropa. Masa aktif BSGI telah diperpanjang tiga kali, yakni pada November 2022, serta Maret dan Mei 2023. Pelabuhan-pelabuhan Ukraina di Laut Hitam diblokade setelah Rusia melancarkan agresi ke negara tersebut pada Februari 2022 lalu. Pada Juli 2022, Rusia dan Ukraina dengan bantuan mediasi Turki serta PBB menyepakati BSGI. Kesepakatan tersebut ditekdi di tengah kekhawatiran terjadinya krisis pangan global akibat konflik Rusia-Ukraina. Lewat BSGI, Moskow memberikan akses bagi Ukraina untuk mengekspor komoditas pertaniannya lewat tiga pelabuhannya di Laut Hitam. Sebagai gantinya, Moskow meminta operasi kapal ke Ukraina dianggap berpotensi membawa kargo militer yang terlibat dalam konflik di pihak Kiev," ungkap Kemenlu Rusia. Sementara itu Juru Bicara Kemenlu Rusia Maria Zakharova mengungkapkan, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan akan berkunjung ke Moskow pada Kamis pekan ini. Dia hendak bertemu dan mengadakan pembicaraan dengan Menteri Luar